

## OPTIMALISASI PROSES PRODUK HALAL DALAM LOGISTIK DI INDONESIA: TANTANGAN, SOLUSI KONTAMINASI, BIAYA SERTIFIKASI, DAN SOSIALISASI

*HALAL PRODUCT PROCESS OPTIMIZATION IN LOGISTICS IN INDONESIA: CHALLENGES,  
CONTAMINATION'S SOLUTION, CERTIFICATION COSTS, AND SOCIALIZATION*

Wynd Rizaldy<sup>1</sup>, Prasadja Ricardianto<sup>2</sup>, Sita Anisah Sholihah<sup>3</sup>, Bagus Sumargo<sup>4</sup>, dan Rizki Eri Utomo<sup>5</sup>.

,E-mail: [wyndrizaldy@gmail.com](mailto:wyndrizaldy@gmail.com)

Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jl. IPN No. 2 Cipinang Besar Selatan Jatinegara, Jakarta, 13410,  
Universitas Negeri Jakarta, Jl Rawamangun Muka Pulo Gadung, Jakarta, 13220, Indonesia  
Asosiasi Halal Logistik Indonesia L'Avenue Office Tower 11th Floor Suite B Jl. Raya Pasar Minggu Kav 16,  
Jakarta, 12780, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tantangan utama dalam implementasi Proses Produk Halal (PPH) pada sektor logistik di Indonesia, dengan fokus pada risiko kontaminasi, biaya sertifikasi yang tinggi, dan kurangnya sosialisasi logistik halal. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi guna mengoptimalkan penerapan PPH pada pengiriman kargo udara. Metode yang digunakan meliputi analisis terhadap lima faktor risiko utama pada kontaminasi, biaya sertifikasi yang masih tinggi dan sosialisasi yang masih kurang. Kelima faktor tersebut terkait dengan prosedur penanganan yang tidak konsisten, penyimpanan bersama produk halal dan non-halal, keterbatasan pelatihan logistik halal, celah regulasi dan pengawasan, serta integritas kemasan selama transit. Temuan menunjukkan bahwa prosedur sertifikasi yang panjang, beban biaya yang tinggi terutama bagi perusahaan logistik berskala kecil, serta kurangnya infrastruktur khusus menjadi penghambat utama. Solusi yang ditawarkan mencakup penyederhanaan proses sertifikasi melalui digitalisasi, peningkatan pelatihan, subsidi bagi perusahaan logistik tersebut, serta kampanye edukasi nasional. Optimalisasi ini diharapkan dapat mengurangi risiko kontaminasi dan biaya sertifikasi, serta meningkatkan kesadaran logistik halal di Indonesia.

Kata kunci: logistik halal, kontaminasi halal, sertifikasi halal, PPH, perusahaan logistik

### ABSTRACT

This study investigates the primary challenges in implementing Halal Product Processes (PPH) in Indonesia's logistics sector, emphasizing contamination risks, high certification costs, and limited awareness of halal logistics. The study aims to identify these issues and propose solutions to enhance PPH application in air cargo shipments. The methods focus on analyzing five contamination risk factors: inconsistent handling, co-storage of halal and non-halal goods, limited halal logistics training, regulatory and supervisory gaps, and transit packaging integrity. Key findings reveal that lengthy certification procedures, substantial costs—especially for small logistics firms—and a lack of specialized infrastructure are significant barriers. Recommended solutions include simplifying certification through digitalization, increasing training opportunities, providing subsidies for logistics companies, and launching national education campaigns. These improvements are expected to lower contamination risks, reduce certification costs, and raise awareness of halal logistics practices in Indonesia.

Keywords: halal logistics, halal contamination, halal certification, PPH, logistics company

## 1. PENDAHULUAN

Peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk halal telah mendorong berbagai sektor industri untuk memastikan setiap tahap dalam rantai pasokannya memenuhi standar halal, termasuk sektor logistik. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, penerapan Proses Produk Halal (PPH) dalam logistik menjadi semakin penting guna menjamin kehalalan produk hingga ke tangan konsumen. Hal ini menjadi perhatian khusus dari Pemerintah dan pelaku usaha logistik dikaitkan dengan pelaksanaan UU no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan turunannya. Namun, implementasi PPH dalam sektor logistik, khususnya pada pengiriman kargo udara, masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi risiko kontaminasi, tingginya biaya sertifikasi, serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait logistik halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang menghambat penerapan PPH dalam sektor logistik Indonesia dan menawarkan solusi untuk mengoptimalkan penerapannya. Dengan fokus pada lima faktor risiko utama—yaitu prosedur penanganan yang tidak konsisten, penyimpanan bersama produk halal dan non-halal, keterbatasan pelatihan logistik halal, celah regulasi dan pengawasan, serta integritas kemasan selama transit. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif. Rekomendasi ini meliputi penyederhanaan proses sertifikasi melalui digitalisasi, peningkatan pelatihan, subsidi bagi perusahaan logistik, dan kampanye edukasi nasional. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat mengurangi risiko kontaminasi, menekan biaya sertifikasi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya logistik halal di Indonesia.

Berikut tantangan atau permasalahan yang dihadapi dan semestinya bisa diselesaikan oleh Pemerintah dan Pelaku usaha di Indonesia, dari hasil identifikasi, maka ketiga masalah yang kami juga sintesakan dari kajian teori dalam paper ini adalah sebagai berikut :

### 1.1. Risiko Kontaminasi

Logistik makanan yang mudah rusak di mana risiko kontaminasi dapat terjadi pada berbagai tahap, termasuk dalam penyimpanan dan transportasi. Dalam kargo udara, kondisi yang tidak steril atau area yang tidak dipisahkan dapat meningkatkan kemungkinan kontaminasi produk halal (Aimi et al., 2022). Titik kontrol halal direkomendasikan sebagai solusi untuk menjaga kualitas halal sepanjang rantai pasok. Dengan risiko kontaminasi

yang tinggi dalam pengiriman udara, artikel ini memperkenalkan konsep logistik halal yang mengintegrasikan kontrol ketat pada semua tahapan transportasi udara. Menurut (Ziegler et al., 2021) tanpa prosedur yang tepat, integritas produk halal bisa terganggu selama perjalanan internasional melalui kargo udara. Praktek implementasi gudang halal di Malaysia, terutama pada sektor kargo udara. Dimana menurut (Abdul Rahman et al., 2018) tujuan utama dari gudang ini adalah memisahkan produk halal dari yang non-halal untuk menghindari kontaminasi silang. Dengan pengaturan area penyimpanan yang khusus, gudang halal mendukung pengiriman produk halal yang aman hingga mencapai konsumen. Menurut (Rahman & Ali, 2024) teknologi dapat meningkatkan efektivitas logistik halal, khususnya dalam konteks kargo udara lintas batas. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan dapat melakukan pemantauan ketat terhadap area penyimpanan dan pemrosesan untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Teknologi ini juga memungkinkan perlindungan lebih lanjut terhadap produk halal selama transit. Sedangkan (Ahmad & Shariff, 2016) pentingnya proses "sertu" untuk menjaga integritas logistik halal, khususnya dalam logistik udara. Proses sertu, atau pembersihan sesuai syariah, diterapkan untuk memastikan peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam logistik udara bebas dari residu non-halal, sehingga menjaga produk halal tetap aman dari kontaminasi. terkait risiko kontaminasi, terdapat konsensus bahwa logistik halal, terutama dalam konteks kargo udara untuk makanan yang mudah rusak, membutuhkan pendekatan khusus untuk menjaga integritas produk halal di tengah risiko kontaminasi yang tinggi. Sintesis dari teori-teori tersebut menunjukkan pentingnya pemisahan, kontrol ketat, dan teknologi dalam memastikan keamanan dan kualitas halal dari produk, serta prosedur pembersihan syariah untuk menghilangkan kontaminasi non-halal. Pertama Risiko Kontaminasi dalam Transportasi Udara Menurut (Aimi et al., 2022), risiko kontaminasi pada produk halal sangat tinggi dalam logistik makanan yang mudah rusak, terutama dalam transportasi udara yang melibatkan berbagai tahap penyimpanan dan transportasi. Kondisi tidak steril atau area yang tidak terpisah meningkatkan risiko, sehingga kontrol halal menjadi penting. Titik kontrol halal dalam setiap tahapan logistik membantu menjaga kualitas produk halal di sepanjang rantai pasokan. Kedua Integritas Produk dan Pemisahan dalam Gudang Halal, (Ziegler et al., 2021) menekankan bahwa tanpa prosedur yang tepat, integritas produk halal bisa terganggu, khususnya dalam perjalanan internasional. Praktek gudang halal di Malaysia yang disebutkan oleh (Abdul Rahman et al., 2018) juga mendukung perlunya pemisahan produk halal dari non-halal untuk menghindari kontaminasi silang. Dengan pemisahan area penyimpanan, gudang halal menjadi

solusi yang memastikan keamanan produk hingga sampai ke konsumen. Ketiga, Pemanfaatan Teknologi untuk Pemantauan Ketat Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas logistik halal (Rahman & Ali, 2024). Pemanfaatan teknologi memungkinkan pemantauan yang lebih ketat pada area penyimpanan dan pemrosesan, meminimalkan risiko kontaminasi di setiap tahap pengiriman. Teknologi ini mendukung perlindungan terhadap produk halal selama transit, terutama pada rute lintas negara. Keempat, Pentingnya Proses “Sertu” untuk Kebersihan Syariah (Ahmad & Shariff, 2016) menguraikan pentingnya proses sertu, yaitu pembersihan sesuai syariah, dalam menjaga integritas logistik halal

### 1.2. Tingginya Biaya Sertifikasi

Tingginya biaya sertifikasi halal dalam logistik berasal dari kebutuhan pelatihan yang intensif untuk menjaga standar kehalalan di setiap tahap operasional. Hal ini terjadi di Malaysia (Ahmad & Shariff, 2016) menyoroti bahwa biaya tinggi berasal dari pelatihan dan pemeliharaan standar yang ketat dalam proses sertifikasi halal. Dan hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Tingginya biaya sertifikasi halal dalam sektor logistik sering kali menjadi penghalang bagi perusahaan untuk menyediakan layanan halal, meskipun ada permintaan yang besar dari konsumen. (Fathi et al., 2015) menyoroti bahwa biaya tinggi dari sertifikasi, khususnya pada penyimpanan dan transportasi, sering menjadi kendala besar bagi perusahaan yang ingin memenuhi standar halal. (Ab Talib et al., 2015) menjelaskan bahwa para ahli logistik di Malaysia mengidentifikasi hambatan besar dalam operasional logistik halal, terutama terkait tingginya biaya sertifikasi dan kebutuhan pengaturan standar yang ketat. Artikel ini juga menyebutkan bahwa hambatan biaya dapat menjadi penghalang bagi perusahaan kecil. (Tiemann, 2015) mengulas tantangan dalam prosedur sertifikasi halal, terutama terkait dengan standar lokal yang tidak selalu sejalan dengan standar internasional. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan proses yang rumit dan biaya yang lebih tinggi dalam mendapatkan sertifikasi halal, terutama di sektor logistik lintas batas. Oleh karenanya Pemerintah akan mengupayakan penyederhanaan prosedur serta menurunkan biaya sertifikasi halal untuk mempercepat pencapaian target Indonesia menjadi produsen produk halal terkemuka dunia pada tahun 2024, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/20/prosedur-dan-biaya-sertifikasi-halal-masih-jadi-kendala>.

Keempat teori tersebut menyoroti bahwa tingginya biaya sertifikasi halal dalam logistik merupakan tantangan utama bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan kecil yang ingin memenuhi permintaan layanan halal. Faktor

biaya tinggi ini terutama disebabkan oleh kebutuhan pelatihan intensif, standar yang ketat, dan ketidakkonsistenan standar internasional dan lokal, yang mempersulit perusahaan untuk memperoleh sertifikasi secara efisien. Pertama Biaya Sertifikasi yang Tinggi Akibat Kebutuhan Pelatihan dan Standar Ketat. Kedua (Ahmad & Shariff, 2016) serta Fathi et al. (Elahe Fathi et al., 2016) mencatat bahwa biaya sertifikasi halal yang tinggi berasal dari kebutuhan pelatihan intensif untuk menjaga standar halal di seluruh tahap operasional logistik, mulai dari penyimpanan hingga transportasi. Biaya ini menjadi penghalang bagi banyak perusahaan, khususnya di Malaysia dan Indonesia, yang ingin menyediakan layanan halal namun terkendala oleh pengeluaran besar untuk memenuhi standar. Ketiga Hambatan bagi Perusahaan Kecil, (Ab Talib et al., 2015) menambahkan bahwa tingginya biaya sertifikasi menjadi penghambat utama bagi perusahaan kecil dalam mengadopsi operasional halal. Kebutuhan pengaturan standar yang ketat membuat perusahaan kecil sulit untuk bersaing, meskipun permintaan konsumen untuk layanan halal cukup tinggi. Keempat Ketidakkonsistenan Standar Internasional dan Lokal, (Tiemann, 2015) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang meningkatkan biaya adalah ketidakkonsistenan antara standar sertifikasi halal lokal dan internasional. Ketidaksesuaian ini membuat proses sertifikasi lebih rumit dan mahal, terutama dalam logistik lintas batas. Tantangan ini menjadi semakin besar bagi perusahaan yang harus menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi di negara-negara yang berbeda.

### 1.3. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait logistik halal.

(Rizki et al., 2024) menganalisis pengembangan logistik halal di Indonesia menggunakan pendekatan *Strength Weakness Opportunity Threat* (SWOT), yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman perusahaan terhadap logistik halal menjadi salah satu hambatan utama dalam industri ini. Rendahnya sosialisasi terkait standar halal dan kekurangan infrastruktur khusus turut mempengaruhi penerapan logistik halal di Indonesia. (Susanty et al., 2021) mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi logistik halal di Indonesia, termasuk kurangnya pemahaman dan niat perusahaan untuk menerapkan prosedur logistik halal secara menyeluruh. (Susanty et al., 2022) membahas bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi penerapan logistik halal di Indonesia, dengan kurangnya permintaan dan pemahaman masyarakat menjadi alasan utama lambatnya adopsi logistik halal. (Rizki et al., 2023) menyoroti kurangnya infrastruktur khusus untuk mendukung manajemen integritas halal di Indonesia serta rendahnya pemahaman pemangku kepentingan tentang standar

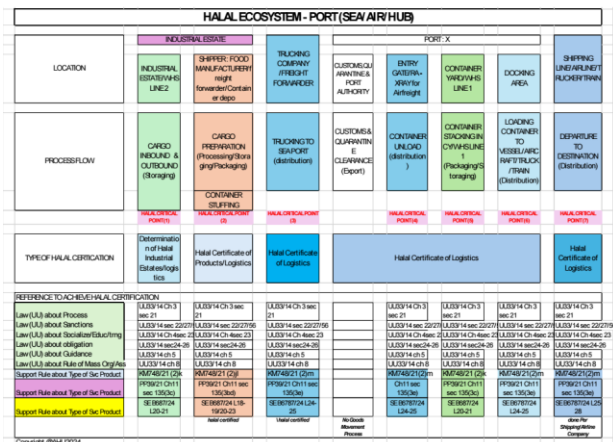
**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
MANAJEMEN INDUSTRI  
DAN RANTAI PASOK**

Vol. 5 Tahun 2024

logistik halal. (Hanifasari et al., 2024) Pada penelitiannya menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang rantai pasok halal, terutama di kalangan generasi milenial, dapat mempengaruhi niat pembelian produk halal di Indonesia. (Susanty et al., 2023) mengkaji pelaksanaan logistik halal di Indonesia dan menunjukkan bahwa kurangnya informasi terkait sertifikasi halal menjadi kendala besar dalam meningkatkan kesadaran tentang logistik halal di kalangan pelaku industry. Secara keseluruhan, teori-teori terkait Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait logistik halal. menunjukkan bahwa tantangan dalam pengembangan logistik halal di Indonesia terletak pada kurangnya pemahaman, sosialisasi, dan infrastruktur khusus, serta rendahnya kesadaran dan permintaan dari konsumen. Upaya untuk memperbaiki kesenjangan ini akan membutuhkan pendekatan terpadu, termasuk peningkatan sosialisasi, pengembangan infrastruktur, serta edukasi yang lebih luas bagi pemangku kepentingan dan konsumen terkait pentingnya logistik halal

**2. METODE PENELITIAN**

Pendekatan terhadap analisis ini dilakukan dan diawali dengan metode penilaian risiko menyeluruh untuk menilai dampak masing-masing faktor dan strategi mitigasi yang relevan hingga diperoleh solusi yang dapat diterapkan. Lebih spesifik lagi kami menggunakan suatu metode penilaian analisis risiko yang disebut *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP). Metode ini sering digunakan untuk mengidentifikasi titik kritis dalam rantai pasokan yang memerlukan perhatian khusus, terutama untuk memastikan kualitas dan keamanan produk, termasuk dalam konteks menjaga kualitas produk halal. Lihat gambar 1 untuk *Halal Critical Point* (HCP) pada suatu ekosistem halal, dimana terdapat 7 titik HCP yang akan menjadi HACCP pada penelitian ini. Halal Critical Point (HCP) dalam konteks Halal Logistics merujuk kepada titik-titik kritikal dalam proses logistik di mana terdapat potensi risiko pencemaran atau pelanggaran prinsip-prinsip halal. HCP ini penting untuk dikenali, dipantau, dan dikawal untuk memastikan produk tetap halal sepanjang rantai pasok, dari pengeluaran hingga ke pengguna akhir (Rizaldy et al., 2024). Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi titik kritis di sepanjang rantai pasokan yang membutuhkan perhatian khusus, serta membantu mereka mengambil langkah pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko kontaminasi dan menjaga kualitas produk halal.



mengundang nara sumber dari Komisi Nasional ekonomi keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ketua dan Sekjen Asosiasi Halal Logistik Indonesia (AHLI), dan Akademisi serta praktisi halal.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### *Hasil Focus Group Discussion*

FGD ini dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2024, bertempat di Institut Transportasi Logistik Trisakti, diselenggarakan oleh ITL Trisakti dan AHLI, dan dihadiri oleh kurang lebih 123 tamu undangan dari kalangan Pelaku Usaha Logistik, 9 perguruan tinggi baik negeri dan swasta yang tertarik dengan kurikulum logistik halal, Pemerintah yang diwakili oleh BPJPH dan KNEKS.

FGD tersebut dilakukan dalam 3 Panel, maka pada Panel pertama, yang menghadiri 2 Pembicara yaitu Pembicara 1: Azumah Putri Amuna (Analisis Infrastruktur Industri Halal, KNEKS), memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri produk halal, terutama di sektor makanan, farmasi, dan kosmetik, yang menunjukkan pertumbuhan pesat. Diprediksi pada tahun 2025, Indonesia akan memiliki sekitar 280.000 sertifikat halal, yang mengindikasikan perkembangan yang signifikan di industri ini. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa proses produksi, distribusi, dan konsumsi produk halal sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup pengawasan ketat terhadap input produksi hingga produk sampai ke konsumen untuk menjaga kehalalan produk tersebut. Terkait "Optimalisasi Proses Produk Halal dalam Logistik di Indonesia: Tantangan, Solusi Kontaminasi, Biaya Sertifikasi, dan Sosialisasi" maka "pada 1. Tantangan Kontaminasi: Azumah menyoroti pentingnya memastikan produk halal tetap terjaga kehalalannya sepanjang rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi. Dalam konteks ini, tantangan utama adalah mencegah kontaminasi silang antara produk halal dan non-halal, yang memerlukan pengawasan ketat di setiap tahap 2. Biaya Sertifikasi: Azumah tidak secara eksplisit membahas biaya sertifikasi, tetapi dalam konteks perkembangan industri halal di Indonesia, biaya sertifikasi menjadi aspek penting untuk menjamin bahwa produk yang beredar di pasar global memenuhi standar halal. 3. Sosialisasi: Azumah menggarisbawahi pentingnya pengembangan ekosistem halal dan syariah, yang meliputi edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri dan masyarakat untuk memastikan kesadaran tentang pentingnya produk halal. Ini berhubungan langsung dengan upaya untuk memperkenalkan standar dan praktik

halal yang tepat di seluruh sektor industry. Pembicara 2: Fitriah Setia Rini (Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal, BPJPH), mengungkapkan bahwa regulasi halal dalam logistik di Indonesia mencakup tidak hanya produk fisik, tetapi juga jasa yang terlibat dalam rantai pasok produk halal. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal untuk barang dan jasa, khususnya yang terkait dengan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Namun, tidak semua barang dan jasa wajib memiliki sertifikasi halal; hanya yang berkaitan dengan bahan baku yang mengandung unsur hewani atau bahan kimiawi yang berpotensi mempengaruhi kehalalan produk yang wajib disertifikasi halal. Saat ini, jumlah sertifikat halal di sektor jasa logistik (pengemasan, penyimpanan, dan distribusi) sudah mencapai 1.049 sertifikat. Terkait "Optimalisasi Proses Produk Halal dalam Logistik di Indonesia: Tantangan, Solusi Kontaminasi, Biaya Sertifikasi, dan Sosialisasi" maka "pada 1. Tantangan Kontaminasi: Fitriah menekankan bahwa sektor logistik, khususnya pengemasan, penyimpanan, dan distribusi, perlu disertifikasi halal untuk memastikan tidak ada kontaminasi selama proses ini. Hal ini juga terkait dengan pemisahan fisik dan prosedural antara produk halal dan non-halal. 2. Terkait biaya sertifikasi, Fitriah menjelaskan upaya pemerintah untuk meringankan beban biaya sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil, yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat halal tetapi dapat menggunakan stempel halal. Ini merupakan solusi yang bertujuan mendorong partisipasi UMKM dalam ekonomi halal tanpa terbebani biaya yang terlalu besar. Dan 3. Sosialisasi, Fitriah juga menekankan pentingnya edukasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal, baik itu untuk produk atau jasa terkait, serta dampaknya terhadap daya saing produk Indonesia di pasar global. Secara keseluruhan, kedua pembicara menekankan pentingnya pengawasan dan sertifikasi halal dalam memastikan integritas produk halal di seluruh rantai pasok, dari produksi hingga distribusi. Selain itu, tantangan terkait biaya sertifikasi, kontaminasi, dan perluasan sosialisasi menjadi topik yang perlu terus dioptimalkan untuk mendukung industri halal di Indonesia, yang merupakan pasar potensial terbesar di dunia.

Pada Panel kedua, dihadirkan juga 2 pembicara dari AHLI, dimana Pembicara 1, Ketua AHLI, Rizki Eri Utomo memaparkan ketiga permasalahan di atas, dan berbagai kendala mengapa sosialisasi logistik halal di Indonesia masih kurang. "Penyebabnya ada lima hal, yaitu: 1) fokus utama pada produk barang/bahan, sementara produk jasa seperti jasa logistik belum jadi prioritas dalam sertifikasi halal); 2) infrastruktur dan

sumber daya terbatas, seperti kurangnya fasilitas pendukung operasional dan tenaga ahli logistik halal; 3) standar yang belum merata, dimana penerapan standar logistik halal oleh personel yang belum kompeten; dan 4) biaya operasional tinggi, dengan penyesuaian logistik halal akan menambah beban biaya; 5) serta edukasi dan kampanye terbatas, dimana sosialisasi masih minim dari lembaga terkait.” ujarnya.. Pembicara 2, Sekretaris Jenderal AHLI, Wynd Rizaldy memaparkan Solusi bagi ketiga permasalahan diatas sebagai berikut : 1) Permasalahan kontaminasi halal dalam pengiriman udara dapat diatasi dengan berbagai langkah, seperti penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang konsisten, pemisahan area penyimpanan khusus produk halal, serta pelatihan khusus bagi personel logistik. Pengawasan yang ketat melalui audit, segel kemasan, dan label halal juga penting untuk menjaga integritas produk. Dalam proses X-ray, produk halal dan non-halal diperiksa terpisah, alat dibersihkan secara menyeluruh, dan penanda khusus diterapkan. Langkah-langkah ini bertujuan mencegah terjadinya kontaminasi silang, sehingga produk halal tetap terjamin selama proses pengiriman; 2) biaya tinggi untuk memperoleh sertifikasi halal tersebut maka perlu dilakukan penyederhanaan proses sertifikasi, kemudian optimalisasi penambahan outlet serta pelatih sebagai bentuk dukungan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM); dan juga perlunya penguatan infrastruktur dan regulasi, ini perlu disatukan; dan 3) Untuk mengatasi kurangnya sosialisasi, perlunya kampanye nasional dan seminar edukasi seperti yang kita lakukan sekarang, program edukasi berkelanjutan serta pelatihan dan bantuan praktis bagi pelaku industry. Biaya sertifikasi halal yang tinggi sering kali memberatkan pelaku usaha di Indonesia, khususnya UKM atau Perusahaan berskala kecil pada industri logistik. Secara keseluruhan, kedua pembicara membahas isu-isu yang sangat relevan dengan optimalisasi proses produk halal dalam logistik, baik itu dalam hal transportasi (seperti kargo udara) maupun dalam sistem rantai pasok produk pangan

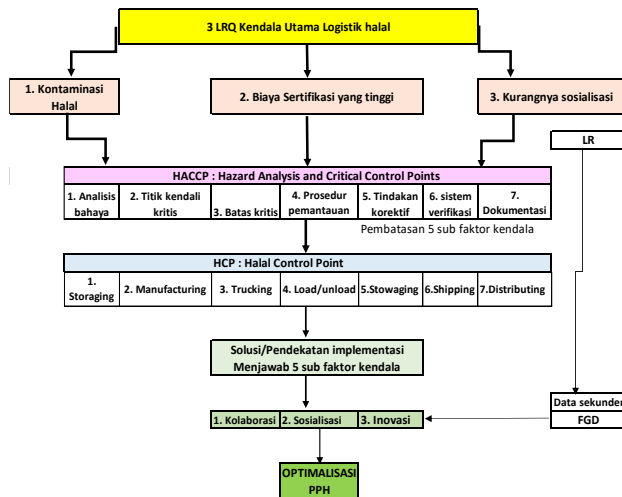
Pada Panel ketiga dihadirkan 2 pembicara, Pembicara 1: H.M Farid Aljawi, SE. MH (Sekjend IKA ITL & Ketua Harian BERSATHU), membahas implementasi logistik halal dalam konteks angkutan kargo udara, terutama yang berkaitan dengan pengangkutan barang untuk jamaah haji dan umroh. Ia menjelaskan bahwa logistik halal melibatkan seluruh proses transportasi, penyimpanan, dan distribusi barang, dengan memastikan bahwa semua tahapan tersebut mematuhi prinsip syariah, termasuk menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi dengan bahan haram. Dalam konteks ini, kargo udara memainkan peran penting dalam memastikan bahwa barang-barang yang diangkut, seperti makanan halal dan perlengkapan ibadah, tetap memenuhi standar halal sepanjang

perjalanan hingga sampai ke tangan konsumen. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan dalam industri yang melayani kebutuhan jamaah haji dan umroh. Kaitannya dengan "Optimalisasi Proses Produk Halal dalam Logistik di Indonesia: Tantangan, Solusi Kontaminasi, Biaya Sertifikasi, dan Sosialisasi" 1) Tantangan Kontaminasi: menekankan pentingnya menjaga kehalalan produk selama transportasi dan distribusi, khususnya dalam konteks kargo udara yang mengangkut barang-barang untuk jamaah haji dan umroh. Dalam hal ini, tantangan utama adalah memastikan bahwa tidak ada kontaminasi antara barang halal dan non-halal selama perjalanan, serta menjaga kebersihan dan kesucian barang yang diangkut 2) Biaya Sertifikasi: tidak secara spesifik membahas biaya sertifikasi, namun dapat dikaitkan dengan pentingnya menjaga standar halal dalam setiap tahap proses logistik. Proses sertifikasi yang memadai dan transparan akan menjadi hal yang mendasar untuk memastikan bahwa barang yang diangkut memenuhi persyaratan halal. 3) Sosialisasi: menyentuh pentingnya membangun kepercayaan pelanggan dalam industri yang melayani kebutuhan jamaah haji dan umroh, yang secara langsung berkaitan dengan sosialisasi tentang pentingnya menjaga standar halal dalam logistik. Proses logistik yang mematuhi prinsip syariah dan menjaga kualitas halal akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pembicara 2: Nurhayati S.tp., M.Si., DBA (Dosen Universitas Prasetya Mulya), menyampaikan tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan industri pangan halal, mengingat besarnya populasi Muslim di negara ini. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas teknologi pangan yang dapat menimbulkan risiko terhadap kecurangan halal, integritas produk, dan transparansi regulasi. Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan penggunaan teknologi digital, termasuk *blockchain*, untuk mencatat dan melaporkan setiap langkah dalam rantai pasok produk halal secara *real-time*. Sistem ini akan memungkinkan transparansi dan mempermudah verifikasi kehalalan produk, sehingga memastikan seluruh proses produksi dapat dipantau, mulai dari pemasok hingga konsumen akhir. Sistem logistik halal yang terintegrasi dan transparan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, efisiensi, dan reputasi perusahaan dalam industri pangan halal. Kaitannya dengan "Optimalisasi Proses Produk Halal dalam Logistik di Indonesia: Tantangan, Solusi Kontaminasi, Biaya Sertifikasi, dan Sosialisasi" 1) Tantangan Kontaminasi : tantangan yang lebih luas dalam industri pangan, yaitu risiko kecurangan halal dan integritas produk akibat kompleksitas teknologi pangan. Penggunaan teknologi digital seperti blockchain dapat membantu mengatasi masalah ini dengan memastikan bahwa setiap tahapan dalam rantai pasok dapat diverifikasi secara transparan,

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
MANAJEMEN INDUSTRI  
DAN RANTAI PASOK**

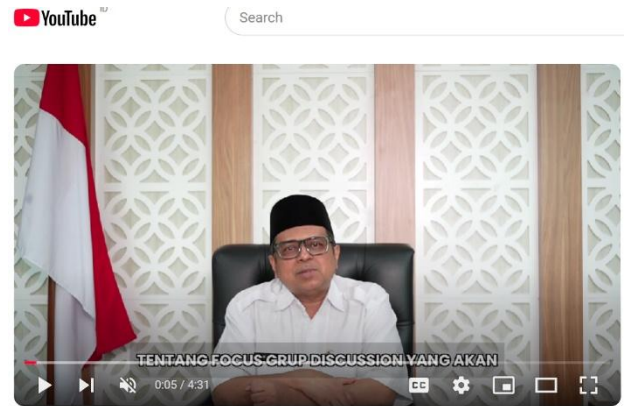
Vol. 5 Tahun 2024

sehingga mencegah kontaminasi atau kecurangan. 2) Biaya sertifikasi: tidak dibahas biaya sertifikasi secara langsung, namun penggunaan teknologi digital yang dapat melacak dan memverifikasi kehalalan produk di seluruh rantai pasok dapat mengurangi biaya yang terkait dengan proses sertifikasi manual. Teknologi ini akan mempermudah proses verifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar halal dengan lebih efisien. 3) Sosialisasi, mengusulkan penggunaan sistem yang transparan untuk melacak dan memverifikasi kehalalan produk, yang tidak hanya akan memberikan informasi kepada konsumen, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya kehalalan produk. Dengan sistem ini, konsumen dapat lebih mudah mengetahui asal-usul dan proses yang dilalui oleh produk yang mereka konsumsi, memperkuat kesadaran halal di masyarakat.



**Gambar 2.** Kerangka berfikir atas 3 Kendala Utama, solusi dan Pendekatan implementasi solusi logistik halal dengan KSId (Kolaborasi, Sosialisasi, Inovasi digitalisasi) mengarah ke optimalisasi PPH.

Hal tersebut diatas telah sejalan dengan arahan Kepala BPJPH, Haikal Hassan Baras yang dalam sambutannya melalui kanal youtube Halal Indonesia dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=-5Z46yDoZ4A> menilai diperlukan tiga hal strategis untuk terciptanya ekosistem produk halal dan halal logistik di Indonesia. Ketiga hal itu adalah kolaborasi antar berbagai pihak dan instansi, sosialisasi dan digitalisasi. Diharapkan, dengan tiga langkah strategis tersebut dapat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan industri halal regional dan internasional.



**SAMBUTAN FGD KEPALA BPJPH | AHMAD HASAN HAIKAL**  
**Gambar 3.** Tayangan youtube tentang sambutan FGD yang akan dilakukan AHLI oleh kepala BPJPH

Dalam era transformasi digital, logistik halal memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui kolaborasi lintas sektor, sosialisasi, dan inovasi teknologi untuk memenuhi permintaan pasar halal yang terus meningkat. (Amalia, E., Rahmatillah & Muslim, 2023) menyoroti peran ekosistem ekonomi syariah dalam memperkuat Usaha Kecil dan Menengah (UKM) halal di Indonesia. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan legalitas dan kendala logistik halal dengan menerapkan konsep edukasi digital yang berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan (Kholili & Hafidah, 2024). Lebih lanjut, (Sumarlin et al., 2024) menyoroti pentingnya pembiayaan layanan keuangan halal untuk mendukung industri logistik halal. Dalam konteks ini, inovasi digital diperlukan untuk memastikan pemisahan dan pengelolaan yang sesuai antara produk halal dan non-halal. Kolaborasi antara institusi keuangan dan pelaku usaha halal menjadi kunci dalam menciptakan rantai pasok yang transparan dan aman. Selain itu, pendekatan teknologi blockchain yang ditawarkan oleh (Iqbal & Ahmad, 2024) memberikan solusi keamanan dan transparansi untuk rantai pasokan halal. Mereka menekankan bahwa inovasi ini memungkinkan pemantauan yang transparan serta memastikan bahwa produk halal tetap terjamin keasliannya dalam rantai distribusi. Terakhir, (Iqbal & Ahmad, 2024) mengidentifikasi tantangan dalam industri halal, termasuk kebutuhan untuk regulasi yang jelas dan efisiensi logistik. Mereka menekankan bahwa kolaborasi antar sektor dan sosialisasi berperan penting dalam mengatasi tantangan ini. Dengan inovasi digital, terutama dalam pemasaran dan manajemen rantai pasok, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi serta daya saing di pasar global

Maka dukungan dari lembaga tersebut dapat mengatasi ketiga permasalahan dan mendukung Solusi serta dapat

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
MANAJEMEN INDUSTRI  
DAN RANTAI PASOK**

Vol. 5 Tahun 2024

mengoptimalkan PPH dalam logistik Halal Indonesia kedepan, hal ini juga diperkuat dengan hasil pengamatan perkembangan sertifikasi halal logistik Indonesia yang diperoleh dari sumber LPPOM MUI pada tahun 2023,(41 Perusahaan Logistik Telah Halal, ASSA Logistik Salah Satunya, 2023) dengan jumlah total 44 perusahaan logistik yang telah tersertifikasi per 1 November 2023, dan (Fakta! Inilah Urgensi Sertifikasi Halal Logistik, 2024) dengan jumlah 219 perusahaan logistik yang telah sertifikasi per Juli 2024 , lalu pembaruan data per september 2024 pada gambar 3 total 825 perusahaan logistik yang telah sertifikasi.



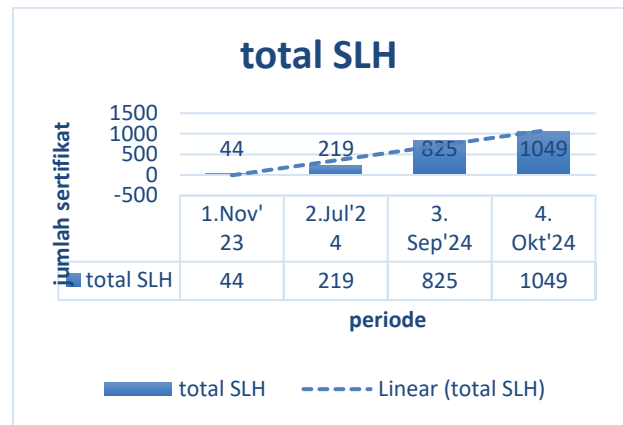
**Gambar 4.** Total Perusahaan jasa logistik yang telah bersertifikasi halal per akhir September 2024.

Kemudian pada gambar 4 total 1049 perusahaan jasa logistik yang telah tersertifikasi halal per 28 Oktober 2024 berdasarkan data BPJPH.



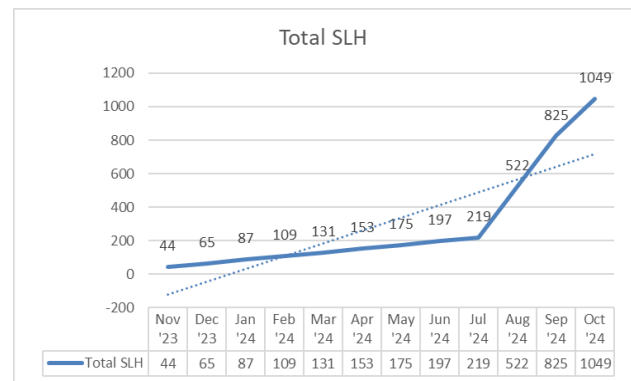
**Gambar 5.** Total Perusahaan jasa logistik yang telah bersertifikasi halal per 28 Oktober 2024.

Sehingga dari 4 data diatas diperoleh grafik peningkatan sertifikasi logistik halal yang dapat dilihat pada gambar 5 dibawah :



**Gambar 6.** Grafik perkembangan peningkatan sertifikasi logistik halal periode November 2023 hingga akhir Oktober 2024 (sumber; Asosiasi Logistik Halal Indonesia 2024).

Dari data Rata-rata 18%/bulan atau sekitar 83 Perusahaan logistik/bulan , Kenaikan tertinggi ada pada periode juli ke September 2024, kurang lebih 139% per bulan Atau 303 Perusahaan logistik/bulan , Paska mandatory 17 Oktober 2024, diharapkan angka tersebut bertahan antara 83-300 Perusahaan /bulan. Secara merata distribusi sertifikasi logistik halal perbulan dapat disimulasikan, dan dilihat pada gambar 6 dibawah.



**Gambar 7.** Grafik simulasi perkembangan peningkatan sertifikasi per bulan dari November 2023 hingga akhir Oktober 2024 (sumber: Asosiasi Logistik Halal Indonesia 2024).

Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik dan tema optimalisasi proses produk halal dalam logistik di Indonesia, berikut ini adalah pembahasan tantangan yang relevan, solusi potensial, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kepatuhan yang berhasil, dengan fokus pada pencegahan kontaminasi, biaya sertifikasi, dan upaya sosialisasi. Beberapa tantangan dalam mencapai kepatuhan; Kesatu- 1) Tantangan dalam


**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
MANAJEMEN INDUSTRI  
DAN RANTAI PASOK**

Vol. 5 Tahun 2024

Pencegahan Kontaminasi dalam Logistik Halal, Salah satu tantangan utama dalam memastikan kepatuhan halal di sektor logistik adalah mencegah kontaminasi silang antara produk halal dan non-halal. Sektor logistik melibatkan berbagai tahap, mulai dari penyimpanan hingga transportasi, di mana risiko kontaminasi dapat terjadi. Untuk mengoptimalkan kepatuhan halal, perusahaan logistik mungkin perlu menerapkan: a) SOP dan pelatihan rutin; b) Fasilitas penyimpanan khusus dan transportasi terpisah untuk barang halal dan non-halal; c) peningkatan pelatihan logistik halal berupa pelatihan khusus untuk personel mengenai prosedur penanganan untuk meminimalkan risiko kontaminasi.; d) audit dan pengawasan ketat terkait Proses pembersihan standar untuk memastikan bahwa sisa non-halal sepenuhnya dihilangkan dari peralatan sebelum menangani barang halal; e) Penjaminan integritas kemasan dengan seal yang lebih kuat dan tanda yang jelas.


Maka perlu Kolaborasi, Sosialisasi, dan Inovasi (KSId) untuk memastikan solusi tersebut diterapkan yaitu dengan K, Kerjasama dengan otoritas bandara dan transportasi untuk kargo udara, dan juga kargo moda transportasi lainnya, S dengan kampanye public mengenai pentingnya logistik halal, dan Id dengan penggunaan *barcode/QR* untuk identifikasi produk halal ataupun non halal yang mana lebih efektif untuk diterapkan. Sosialisasi dan pelatihan yang efektif juga sebaiknya dilakukan sebelum dan saat melakukan sertifikasi logistik halal, agar makin banyak personel yang memiliki pemahaman dalam menerapkan pencegahan kontaminasi saat PPH. Hal tersebut juga ditambahkan oleh (Lesmini & Rizaldy, 2021) yang menekankan pentingnya penggunaan seragam khusus dan langkah-langkah penutupan rapat dalam *cold storage* di bandara untuk mencegah kontaminasi silang antara pekerja halal dan non-halal dalam pengiriman kargo udara. Program edukasi berkelanjutan juga penting untuk memberikan pelatihan praktis bagi pelaku industri, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan standar logistik halal dengan benar dan konsisten. (Saribanon et al., 2019) menjelaskan bahwa implementasi prosedur logistik yang efektif, termasuk perlindungan selama proses pengiriman internasional, adalah kunci untuk menjaga kargo halal bebas dari kontaminasi pada pelabuhan dan terminal kargo udara

**Tabel 1.** Kendala ,solusi dan KSId kontaminasi dalam logistik halal.

Kendala Utama	HACCP pada HCP	Solusi	Kolaborasi	Sosialisasi	Inovasi Digitalisasi
 <b>1. Kontaminasi Halal dalam Kargo Udara</b>	1. Prosedur penanganan tidak konsisten (HCP 1-7)	1. Terapkan SOP dan pelatihan rutin	Kerjasama dengan otoritas bandara dan transportasi	Kampanye publik mengenai pentingnya logistik halal	Penggunaan barcode/QR untuk identifikasi produk
	2. Area penyimpanan bersama (HCP 1,5)	2. Area khusus penyimpanan halal			
	3. Keterbatasan pelatihan logistik halal (HCP 1-7)	3. Peningkatan pelatihan logistik halal			
	4. Celah regulasi dan pengawasan (HCP 1-7)	4. Audit dan pengawasan ketat			
	5. Kerusakan segel saat transit (HCP 6-7)	5. Penjaminan integritas kemasan			

Lalu kendala ke-2) Biaya Sertifikasi sebagai Hambatan Kepatuhan, Biaya sertifikasi adalah hambatan signifikan lainnya, terutama bagi operator logistik kecil dan menengah. Untuk mengatasi tantangan ini, solusi potensial meliputi: a) Subsidi pemerintah atau insentif finansial untuk mendukung operator logistik kecil dalam menutupi biaya sertifikasi; a) Prosedur sertifikasi yang disederhanakan yang mengurangi beban administratif tanpa mengurangi integritas standar halal. b) optimalkan biaya operasional bagi biaya Lembaga pemeriksa halal; c) Penambahan auditor halal terlatih ; d) dukungan untuk UKM / Perusahaan logistik skala kecil; dan e) Penguatan infrastruktur dan regulasi pendukung penerbitan sertifikasi logistik halal dan badan sertifikasi halal untuk mengurangi biaya melalui sumber daya bersama atau proses yang lebih efisien. Dukungan seperti ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan mendorong pendekatan yang lebih konsisten terhadap sertifikasi halal di sektor logistik. KSId yang dilakukan adalah K dengan Lembaga sertifikasi halal melalui asosiasi logistik, S dengan edukasi UKM/Perusahaan logistik skala kecil tentang pentingnya sertifikasi halal, dan Id dengan sistem sertifikasi online terintegrasi kecepatan layanan informasi digital. Hal tersebut terlihat pada tabel 2 dibawah :

**Tabel 2.** Kendala ,solusi dan KSId Biaya sertifikasi mahal dalam logistik halal.


Kendala Utama	HACCP pada HCP	Solusi	Kolaborasi	Sosialisasi	Inovasi Digitalisasi
 <b>2. Biaya Sertifikasi Mahal</b>	1. Proses sertifikasi panjang (HCP 1-7)	1. Penyederhanaan	Kolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal	Edukasi kepada UKM/pers logistik skala kecil tentang pentingnya sertifikasi halal	Sistem sertifikasi online terintegrasi dengan kecepatan layanan informasi digital
	2. Biaya operasional lembaga tinggi	2. Optimalisasi biaya operasional			
	3. Keterbatasan auditor terlatih	3. Penambahan auditor terlatih			
	4. Beban bagi UKM/Perusahaan logistik skala kecil	4. Dukungan untuk UKM			
	5. Infrastruktur dan regulasi baru (HCP 1-7)	5. Penguatan infrastruktur & regulasi			

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
MANAJEMEN INDUSTRI  
DAN RANTAI PASOK**

Vol. 5 Tahun 2024

Selanjutnya kendala ketiga 3) Pentingnya Upaya Sosialisasi dan Penyadaran, Peningkatan sertifikasi yang cepat menjelang tenggat waktu Oktober 2024 menunjukkan pentingnya kampanye kesadaran dan sosialisasi. Seiring mendekatnya tenggat waktu, operator logistik tampaknya menjadi lebih sadar akan persyaratan regulasi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan upaya pemerintah atau tekanan industri. Untuk integrasi proses halal yang optimal, upaya kesadaran yang berkelanjutan sangat penting untuk mendidik operator mengenai manfaat dan persyaratan sertifikasi halal. Sosialisasi harus mencakup: a) Kampanye kesadaran publik untuk mempromosikan pentingnya logistik halal kepada konsumen dan pelaku usaha. b) pengembangan infrastruktur dan SDM melalui lokakarya dan program pelatihan yang ditujukan khusus untuk operator logistik untuk menjelaskan persyaratan, manfaat, dan proses sertifikasi halal c) Standarisasi regulasi dengan prosedur yang dapat diterapkan dan tidak membebani pelaku usaha; d) insentif untuk UKM dan perusahaan logistik skala kecil, dan ; e) edukasi berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Lembaga terkait dan asosiasi logistik khusus asosiasi logistik halal. Sedangkan KSId untuk hal tersebut adalah K dengan Kolaborasi atau kemitraan asosiasi industri untuk mendorong pendekatan yang terpadu dan mencapai audiens yang lebih luas; S dengan peningkatan kesadaran melalui seminar dan edukasi, dan; Id dengan portal informasi digital untuk logistik halal. Selain itu (Aprilia & Priantina, 2022) menyoroti tantangan biaya sertifikasi halal yang tinggi, proses yang rumit, dan waktu berlaku yang singkat sebagai hambatan utama dalam peningkatan sertifikasi halal di sektor kuliner. (Suganda et al., 2024) menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan sertifikasi halal di kalangan pelaku UMK dapat ditingkatkan melalui edukasi dan pendampingan, guna mengurangi beban biaya dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban sertifikasi halal.

**Tabel 3.** Kendala ,solusi dan KSId kurangnya sosialisasi logistik halal

Kendala Utama	HACCP pada HCP	Solusi	Kolaborasi	Sosialisasi	Inovasi Digitalisasi
 3. Kurangnya Sosialisasi Logistik Halal	1. Fokus pada produk utama (HCP 1-7)	1. Kampanye nasional	Kolaborasi dengan pemerintah dan asosiasi	Peningkatan kesadaran melalui seminar dan edukasi	Portal informasi digital untuk logistik halal
	2. Terbatasnya infrastruktur & sumber daya (HCP 1-7)	2. Pengembangan infrastruktur			
	3. Standar belum merata (HCP 1-7)	3. Standarisasi regulasi			
	4. Biaya operasional tinggi (HCP 1)	4. Insentif untuk UKM			
	5. Edukasi terbatas (HCP 1-7)	edukasi berkelanjutan			

(Alhamudi, 2022) menyampaikan bahwa kurangnya sosialisasi yang efektif telah menyebabkan ketidaktahuan

pelaku industri tentang konsep dan praktik logistik halal. Banyak pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang belum memahami pentingnya memastikan kehalalan tidak hanya dalam produk akhir, tetapi juga di seluruh proses rantai pasokan. Edukasi berkelanjutan dan sosialisasi menyeluruh dapat membantu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar halal global, serta memperkuat integritas produk halal yang dihasilkan oleh IKM di sektor minuman dan pangan. (Saribanon et al., 2019) menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) sangat tergantung pada pengetahuan dan kesadaran para pelaku usaha mengenai kebijakan dan prosedur logistik halal. Mereka menyoroti bahwa penerapan SJH memerlukan komitmen kuat yang hanya bisa dicapai melalui sosialisasi dan pendidikan yang terarah. Hal ini juga mencakup pemahaman mengenai standar-standar yang harus diikuti untuk menjamin integritas halal dari proses awal hingga distribusi akhir produk.

**4. KESIMPULAN**

Pertumbuhan Sertifikasi sebagai Refleksi Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Grafik menunjukkan peningkatan yang substansial dalam jumlah sertifikasi logistik halal (SLH) selama periode yang diamati. Peningkatan ini menunjukkan bahwa operator logistik semakin menyadari dan responsif terhadap persyaratan sertifikasi halal. Percepatan signifikan dalam sertifikasi menjelang tenggat waktu Oktober 2024 menunjukkan bahwa banyak operator sedang berupaya untuk mematuhi regulasi guna selaras dengan ketentuan pemerintah. Perubahan ini menandai langkah maju yang penting dalam optimalisasi logistik halal.

4.1. Dalam pencegahan kontaminasi, maka Peningkatan sertifikasi menunjukkan upaya operator untuk mengatasi risiko ini, namun kompleksitas operasi logistik mengharuskan adanya protokol khusus yang kuat, masih diperlukan inovasi seperti digitalisasi guna melakukan penelusuran, pengawasan penerapan logistik halal. Dengan kolaborasi yaitu bekerjasama dengan otoritas bandara dan transportasi, dilanjutkan dengansosialisasi kampanye public yang intens mengenai pentingnya logistik halal, serta dengan inovasi digital seperti penggunaan barcode/QR untuk identifikasi produk. Maka diharapkan dengan implementasi bisa menjadi solusi bagi pencegahan kontaminasi tersebut.

4.2. Penanganan biaya tinggi dalam sertifikasi logistik halal, maka dengan adanya peningkatan sertifikasi yang stabil menunjukkan indikasi bahwa beberapa perusahaan sudah melakukan investasi dalam penyesuaian ini, tetapi

penerapannya secara luas di seluruh industri tetap menjadi tantangan. Mencapai sertifikasi halal membutuhkan sumber daya finansial dan upaya administratif, yang bisa menjadi beban bagi beberapa perusahaan. Pertumbuhan sertifikasi yang pesat menjelang bulan-bulan sebelum Oktober 2024 mungkin menunjukkan bahwa banyak operator menunda sertifikasi karena keterbatasan finansial atau menunggu dorongan akhir mendekati tenggat waktu. Dukungan dalam bentuk insentif atau subsidi dari pemerintah juga akan sangat membantu meringankan biaya bagi usaha skala kecil. Infrastruktur yang kuat dan regulasi yang efisien juga diperlukan agar proses sertifikasi halal menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses oleh berbagai lapisan industri. Dengan kolaborasi bersama lembaga sertifikasi halal, Lembaga Penjamin Halal dan Lembaga lain yang terkait, disertai edukasi kepada UKM/Perusahaan ogistik skala kecil tentang pentingnya sertifikasi halal, kemudian penerapan sistem sertifikasi online terintegrasi dengan kecepatan layanan informasi digital, maka diharapkan biaya sertifikasi halal yang tinggi bisa ditekan.

4.3. Terkait upaya sosialisasi yang teratur dan terarah, maka sejogjanya pemerintah berkolaborasi dengan asosiasi logistik untuk memastikan bahwa operator logistik tetap terinformasi, mengurangi kemungkinan kepatuhan di menit terakhir, dan memfasilitasi adaptasi yang lebih lancar terhadap persyaratan halal. Harmonisasi regulasi halal secara nasional dan internasional, serta pemberian subsidi bagi UKM/Perusahaan logistik berskala kecil akan mempercepat penerapan logistik halal di Indonesia. Oleh karena itu, edukasi tentang logistik halal bukan hanya untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga untuk memperkuat citra produk Indonesia di mata konsumen Muslim baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Dengan kolaborasi dengan pemerintah seperti KNEKS, BPJPH dan asosiasi logistik nasional, dilanjutkan dengan peningkatan kesadaran melalui seminar dan edukasi pada perusahaan logistik. Lalu implementasi inovasi digital melalui portal informasi digital untuk logistik halal, maka diharapkan sosialisasi bisa lebih baik kedepan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 41 Perusahaan Logistik Telah Halal, ASSA Logistik Salah Satunya. (2023). <https://halalmui.org/41-perusahaan-logistik-telah-halal/>
- Ab Talib, M. S., Abdul Hamid, A. B., Zulfakar, M., & Chin, T. (2015). Barriers to Halal Logistics Operation: Views from Malaysian Logistics Experts. *International Journal of Logistics Systems and Management*, 22, 193–209. <https://doi.org/10.1504/IJLSM.2015.071545>
- Abdul Rahman, N. A., Mohammad, M. F., Abdul Rahim, S., & Mohd Noh, H. (2018). Implementing air cargo halal warehouse: insight from Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 9(3), 462–483. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2016-0071>
- Ahmad, N., & Shariff, S. M. (2016). Supply Chain Management: Sertu Cleansing for Halal Logistics Integrity. *Procedia Economics and Finance*, 37, 418–425. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30146-0](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30146-0)
- Aimi, S., Zainal, S., & Ahmad, N. N. (2022). Identification of Potential Hazard and Halal Control Points for Perishable Food During Food Logistics. *JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES*, 8, 1–15.
- Alhamudi, F. (2022). *Analisis Daya Saing Dan Logistik Halal Industri Minuman: Perspektif Industri Kecil Dan Menengah* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42028/16522207.pdf?sequence=1>
- Amalia, E., Rahmatillah, I., & Muslim, B. (2023). *Penguatan UKM Halal di Indonesia (Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah)*. Samudra Biru.
- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50–71. <https://doi.org/10.30653/ijma.202221.46>
- Fakta! Inilah Urgensi Sertifikasi Halal Logistik. (2024). <https://halalmui.org/fakta-inilah-urgensi-sertifikasi-halal-logistik/>
- Fathi, E., Zailani, S., & Kanapathy, K. (2015). Drivers of Consumers' Willingness to Pay for Halal Logistics. *British Food Journal*.
- Hanifasari, D., Masudin, I., Zulfikarjiah, F., Rumijati, A., & Restuputri, D. P. (2024). Millennial generation awareness of halal supply chain knowledge toward purchase intention for halal meat products: empirical evidence in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 15(7), 1847–1885. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2023-0012>
- Iqbal, T., & Ahmad, L. (2024). Menerapkan Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi dan Keamanan Rantai Pasokan: Studi Kasus di Industri Kelapa Sawit. *Jurnal Manajemen Dan Teknologi*, 1(1), 33–42. <http://journal.stmiki.ac.id/index.php/jmt/article/view/775%0Ahttps://journal.stmiki.ac.id/index.php/jmt/article/download/775/557>
- Kholili, M. I., & Hafidah, M. S. (2024). M-3 Youth: Konsep Inovasi Digital Edupreneurship Berbasis Pla sebagai Manifestasi Capaian SDGs Poin 8

- melalui Percepatan Mandatory Halal 2024. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM*, 1, 24–32.
- Lesmini, L., & Rizaldy, W. (2021). Studi Perbandingan Prosedur Penanganan Barang Perishable untuk Cold Storage di Pelabuhan dan Bandara Internasional di Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 7(1), 53–64. <https://doi.org/10.54324/j.mbt.v7i1.638>
- Rahman, N. A. A., & Ali, M. H. (2024). *Tech-Driven Halal Logistics: A Gateway to Efficient Service Quality and Cross-Border Trade BT - Emerging Technology and Crisis Management in The Halal Industry: Issues and Recent Developments* (N. A. A. Rahman & M. H. Ali (Eds.); pp. 273–286). Springer Nature Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-97-1375-2\\_18](https://doi.org/10.1007/978-981-97-1375-2_18)
- Rizaldy, W., Iqbal, F., Sholihah, S. A., & Angga, A. (2024). *Principles in Halal Logistics Management* (1st ed.). in media.
- Rizki, D., Hamzah, M., Fakhroh, Z., & Hendri, D. (2023). Best Practice Halal Integrity Management in The Logistic Chain Scheme: Analysis of Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Economic Laws*, 6(1), 13–29. <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.19867>
- Rizki, D., Jadidah, W. N., Azzam, R., & Afif, A. (2024). Development of Indonesian Halal Logistic: A SWOT Approach. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 4810, 17–44.
- Saribanon, E., Purba, O., & ... (2019). Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis* ..., 5(3), 319–330. <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmbtl/article/view/809%0Ahttps://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmbtl/article/download/809/400>
- Suganda, A. R., Ginantaka, A., & Delfitriani, D. (2024). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Skala UMK di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 6(2 SE-Articles), 13–34. <https://doi.org/10.30997/jiph.v6i2.15627>
- Sumarlin, A., Jamaluddin, N., & Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, S. (2024). Pembiayaan Layanan Jasa Keuangan Industri Halal. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 2024–2665. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1303>
- Susanty, A., Puspitasari, N. B., Caterina, A. D., & Jati, S. (2021). Mapping the barriers for implementing halal logistics in Indonesian food, beverage and ingredient companies. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 649–669. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0244>
- Susanty, A., Puspitasari, N. B., Jati, S., & Selvina, O. (2022). Impact of internal and external factors on halal logistics implementation. *Journal of Islamic Marketing*, 13(5), 1143–1170. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0293>
- Susanty, A., Puspitasari, N. B., Silviannisa, S., & Jati, S. (2023). Measuring halal logistics implementation. *Journal of Islamic Marketing*, 14(7), 1669–1695. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2021-0266>
- Tieman, M. (2015). Halal Certification Procedures: Some Unresolved Issues. *ICR Journal*, 6(1), 124–127. <https://doi.org/10.52282/icr.v6i1.363>
- Ziegler, Y., Uli, V., Kramer, A., & Tatari, M. (2021). Development of an innovative halal logistics concept for the air cargo supply chain. *RePEc: Research Papers in Economics, April*. <https://ideas.repec.org/p/zbw/hfwps/18.html>